



Risalah Kebijakan

Nomor 23, Oktober 2021

Meningkatkan **Kemandirian Masyarakat Papua** melalui **Pembelajaran Vokasi Fungsional** di PKBM



Ringkasan

- Keikutsertaan masyarakat Papua Barat dan Papua sebagai warga belajar di PKBM dapat menjadi salah satu upaya pencegahan putus sekolah karena kesulitan akses pendidikan.
- Warga belajar di PKBM umumnya berusia dewasa dan berasal dari keluarga miskin. Pembelajaran vokasi fungsional memberikan manfaat dalam mendorong kemampuan berwirausaha, membuka peluang mendapatkan pekerjaan, dan penghasilan tambahan.
- Tantangan dan peluang yang beragam memerlukan adanya model pembelajaran vokasi fungsional berbasis kewilayahan, yang mencakup beberapa komponen pendukung, seperti: pendekatan andragogi, daya juang, zona substansi, kewirausahaan, sertifikasi, pembelajaran TIK serta kolaborasi, agar menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan berkarakter.

Konteks

Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan dua wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi (BPS, 15 Juli 2019), sehingga diprioritaskan untuk dilakukan percepatan pembangunan (Perpres No. 21, 2018). Setidaknya terdapat enam penyebab ketertinggalan di kedua provinsi tersebut, salah satunya kualitas SDM, sehingga perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas SDM tersebut melalui pendidikan, salah satunya pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C (Perpres 21/2018).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Papua Barat dan Papua merupakan wadah bagi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua. PKBM dapat diselenggarakan di perkotaan ataupun perdesaan. Pengelolaan PKBM diserahkan kepada masyarakat setempat untuk menyediakan berbagai kesempatan belajar dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat (ACCU, 2020). Sejauh ini, terdapat 39 PKBM di Papua Barat dan Papua yang dikelola pemerintah, dan 496 PKBM dikelola swasta (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id>). Keikutsertaan masyarakat Papua Barat dan Papua menjadi warga belajar PKBM umumnya bertujuan agar terhindar dari putus sekolah. Penyiapan lulusan PKBM utamanya adalah agar warga belajar memiliki keterampilan sesuai tuntutan dunia kerja maupun keterampilan untuk berwirausaha. Salah satu pengalaman belajar yang diberikan sebagai bekal bagi lulusan Paket B dan Paket C adalah pembelajaran vokasi fungsional.

Vokasi fungsional merupakan bagian dari program kecakapan hidup pada mata pelajaran kelompok khusus dalam struktur kurikulum PKBM (Kemendikbud, 2017a & 2017b). Budaya, adat istiadat, dan potensi wilayah di Papua Barat dan Papua yang beragam dapat menjadi modal bagi pembelajaran vokasi fungsional melalui mata pelajaran kelompok khusus di PKBM. Hal tersebut mengingat bahwa kelompok keterampilan pada struktur kurikulum pendidikan kesetaraan memuat program pengembangan kecakapan hidup dan kepribadian profesional serta jiwa wirausaha mandiri (Kemendikbud, 2017a, 2017b). Kelompok keterampilan ini diberikan sesuai dengan potensi daerah, kebutuhan warga belajar, dan peluang kesempatan kerja yang tersedia bagi warga belajar.

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) melakukan kajian yang bertujuan menghasilkan rekomendasi berupa model pembelajaran vokasi fungsional yang dapat berkontribusi bagi kemandirian dan keberdayaan masyarakat terutama lulusan PKBM di Papua Barat dan Papua, berdasarkan hasil analisis dari berbagai informasi yang diperoleh pada saat pengumpulan data. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pengumpulan data secara daring karena situasi pandemi COVID-19 tidak memungkinkan pengumpulan data secara langsung. Teknik pengumpulan data mencakup: studi dokumen, pengisian angket, wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Informan yang terlibat dalam kajian ini terdiri atas: profesional, ahli kurikulum, pengelola PKBM, pejabat Dinas Pendidikan Kota Sorong, Kota Jayapura, dan Kabupaten Merauke, serta pemerhati pendidikan.

Warga Belajar di PKBM umumnya berusia melampaui usia jenjang pendidikannya dan berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Kompetensi umum peserta didiknya cukup baik, namun perlu peningkatan khususnya pada keterampilan abad-21 dan daya juang.

Pada diskusi dengan unsur pimpinan Dinas Pendidikan Kota Sorong, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke diperoleh informasi bahwa PKBM yang memberikan pembelajaran vokasi fungsional kepada warga belajar, hanya terdapat di Kota Jayapura. Atas dasar hal tersebut, penggalian informasi diarahkan pada tiga PKBM di Kota Jayapura yang menyelenggarakan pembelajaran vokasi fungsional. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh warga belajar di tiga PKBM tersebut berusia melampaui usia jenjang pendidikannya (Tabel 1).

Tabel 1 Usia Warga Belajar PKBM Kota Jayapura

Usia	Jumlah WB Paket B menurut Usia			Usia	Jumlah WB Paket C menurut Usia		
	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
14-15	0	0	0	16-17	2	0	0
15-16	5	0	0	17-18	0	0	0
16-17	0	0	2	18-19	2	3	1
17-18	10	7	0	19-20	2	3	33
18-19	1	7	5	20-21	1	7	48
>19	26	38	40	>21	32	57	73

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua, sebagian besar orang tua warga belajar adalah lulusan SD dan SMP. Hanya sedikit warga belajar dengan orang tua berlatar belakang SMA atau Paket C, bahkan ada orang tua yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Secara umum, warga belajar berasal dari keluarga miskin dengan pekerjaan orang tua umumnya merupakan buruh, petani, dan nelayan. Umumnya orang tua warga belajar tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Dilihat dari capaian kompetensi warga belajar, secara umum pengelola PKBM mempersepsikan capaian belajar para warga belajar sudah baik, karena dari 11 kompetensi yang diharapkan, 10 di antaranya yaitu membaca dengan baik, menulis dengan baik, berhitung, bernalar/logika, berkesenian, budaya setempat, olahraga, prakarya, berbahasa Indonesia, serta memanfaatkan perangkat TIK secara tepat, dapat dicapai oleh hampir seluruh warga belajar. Kompetensi berbahasa Inggris merupakan kompetensi yang paling rendah dicapai oleh warga belajar.

Berkenaan dengan capaian keterampilan abad ke-21, pengelola PKBM memiliki persepsi bahwa ada beberapa keterampilan abad ke-21 yang masih perlu ditingkatkan, karena hanya dicapai oleh sedikit warga belajar, seperti: berpikir ilmiah, kemampuan mengelola keuangan pribadi, berpikir kritis, kreatif, berinisiatif, mampu mengatasi masalah dan memiliki daya tahan, dan mampu memimpin kelompok. Di samping itu, terdapat keterampilan abad ke-21 lainnya yang dianggap sudah dicapai oleh warga belajar meskipun masih perlu ditingkatkan, yaitu: kemampuan berbahasa dan memahami teks, matematika/numerasi, keterampilan menggunakan TIK, berkomunikasi, berkolaborasi, rasa ingin tahu, kemampuan menyesuaikan diri, serta keterampilan menyikapi keragaman sosial dan budaya.

Berkenaan dengan daya juang warga belajar, ternyata pengelola PKBM memiliki persepsi bahwa umumnya warga belajar (khususnya Paket B) masih kurang memiliki daya juang, sedangkan Paket C sebagian telah memiliki daya juang. Daya juang merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi permasalahan secara positif sehingga dapat mengatasinya dan mencapai tujuan yang diharapkan (Listiawati, 2016).

Penyelenggaraan pembelajaran vokasi fungsional di PKBM masih memerlukan pembenahaan pada beberapa aspek. Praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh PKBM di luar Papua dapat diadopsi atau diadaptasi oleh PKBM di Papua.

Terdapat tiga PKBM di Jayapura yang menyelenggarakan pembelajaran vokasi fungsional dengan tujuan meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki warga belajar agar dapat membuka lapangan pekerjaan, memberi peluang bagi warga belajar mencari pekerjaan, dan bisa berwirausaha.

Sejauh ini, menurut pengelola PKBM maupun unsur dinas pendidikan, belum ada ketentuan baku mengenai pembelajaran vokasi fungsional karena pembelajaran vokasi fungsional menggunakan potensi sumber daya dan kekayaan di lingkungan PKBM, sehingga sulit untuk distandarkan oleh pemerintah. Vokasi fungsional tidak muncul secara eksplisit sebagai mata pelajaran di dalam struktur kurikulum Paket B dan Paket C, sehingga pembelajaran vokasi fungsional kurang mampu memotivasi warga belajar.

Papua Barat dan Papua memiliki kekayaan yang dapat menjadi modal bagi pembelajaran vokasi fungsional, salah satunya di Kota Jayapura. Menurut perwakilan dinas pendidikan, Kota Jayapura memiliki potensi sebagai kota transit, memiliki pantai, wilayah penghasil sumber pangan melalui sektor pertanian dan perkebunan, dan memiliki kekhasan budaya lokal. Oleh sebab itu, keterampilan yang diberikan melalui pembelajaran vokasi fungsional di PKBM dapat sangat beragam, seperti: otomotif, kuliner, budi daya ikan air tawar, pengolahan sampah, pengrajin sandal rumahan, TIK, dan cenderamata.

Instruktur bagi pembelajaran vokasi fungsional dianggap telah memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Sarana dan prasarana tersedia dengan mencukupi di dua PKBM, namun lebih minim di PKBM lainnya. Begitu pula perangkat TIK tersedia secara memadai di dua PKBM, tetapi tidak memadai di satu PKBM lainnya. Namun, kekurangan sarana prasarana dan perangkat TIK tersebut sejauh ini dianggap tidak menjadi kendala bagi pembelajaran vokasi fungsional.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembelajaran vokasi fungsional disiapkan dalam bentuk silabus dan RPP. Pengelola PKBM mengakui bahwa instruktur vokasi fungsional masih kurang mampu menyusun silabus dan RPP. Untuk mengatasi keterbatasannya, dilakukan upaya pencarian informasi dari guru SMK. Aktivitas pembelajaran dijalankan dengan menyesuaikan ketersediaan waktu warga belajar, dapat dilakukan secara kombinasi daring, tatap muka, tutorial dan mandiri, serta menggunakan lembar tugas atau modul. Kegiatan tatap muka jarang dilakukan karena warga belajar banyak memiliki kesibukan. Pembelajaran secara daring juga jarang dilakukan mengingat banyak warga belajar yang tidak memiliki gawai dan biaya untuk membeli paket data internet. Pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka, misalnya melalui kegiatan praktik langsung, dilakukan dengan bahan dan peralatan yang disediakan oleh warga belajar maupun PKBM.

Karya yang merupakan hasil belajar vokasi fungsional sudah ada yang dimanfaatkan langsung oleh dunia usaha dan industri, termasuk oleh masyarakat yang membeli hasil karya warga belajar. PKBM juga bekerja sama dengan BUMN untuk menjual hasil karya warga belajar, meskipun pengelola PKBM tidak menyebutkan secara detail BUMN yang dimaksud.

Sertifikat merupakan tanda bahwa warga belajar telah mengikuti dan lulus vokasi fungsional. Sertifikat dapat dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan atau pengurusan administrasi bagi lulusan yang memutuskan berwirausaha. Namun, sertifikat vokasi fungsional di PKBM masih bermasalah karena hanya diberikan kepada warga belajar yang mengikuti keterampilan pilihan pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). PKBM tidak diizinkan menerbitkan sertifikat vokasi fungsional secara mandiri meskipun menyelenggarakan vokasi fungsional dengan kompetensi yang sama dengan kompetensi pada LKP. Di LKP, warga belajar harus membayar untuk ikut uji kompetensi, padahal warga belajar umumnya berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di wilayah pedalaman. Di sisi lain, dunia usaha dan industri tidak mensyaratkan sertifikat vokasi fungsional saat menerima pegawai lulusan PKBM.

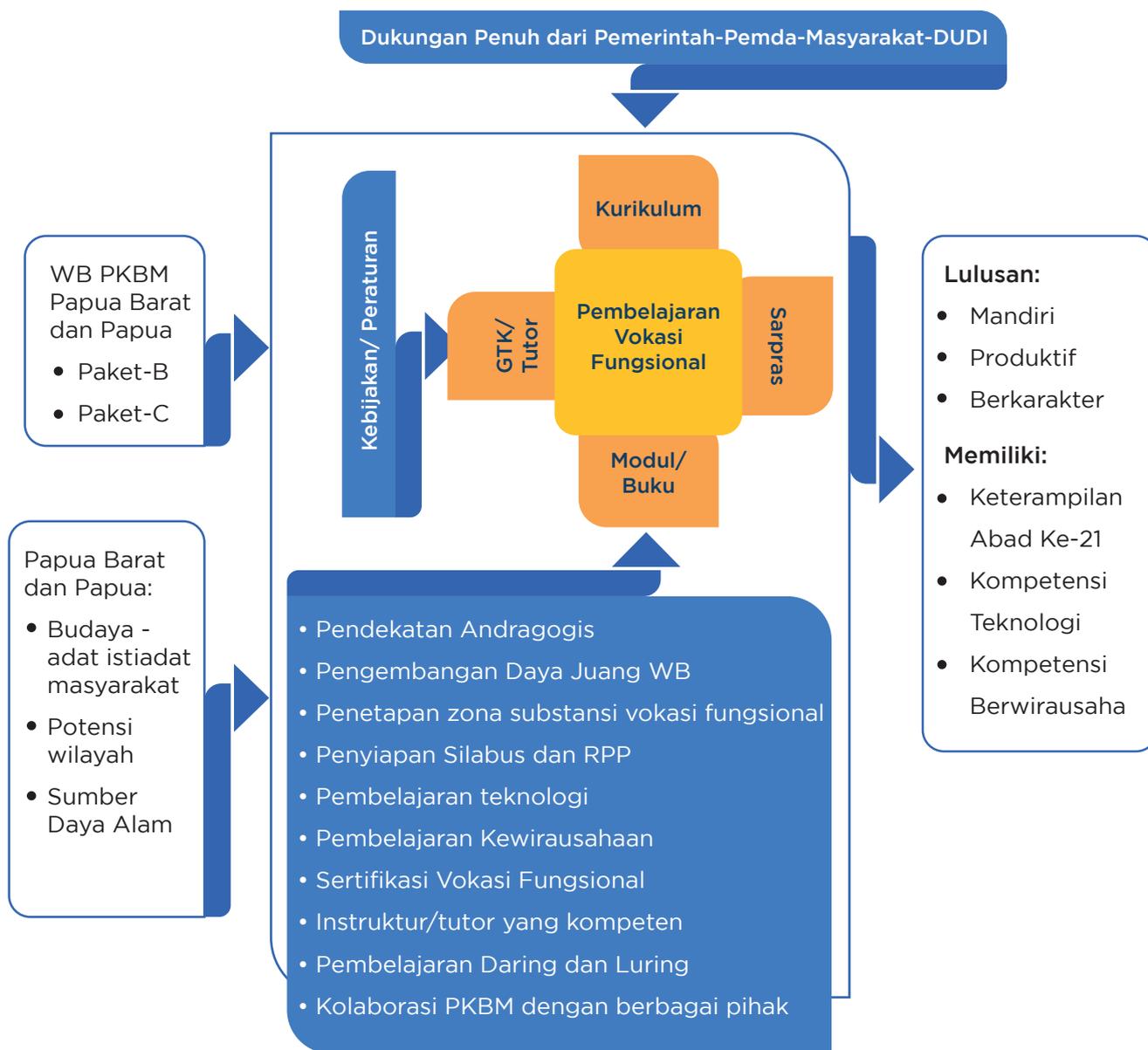
Penyelenggaraan pembelajaran vokasi fungsional di PKBM membutuhkan dukungan dan peran berbagai pemangku kepentingan. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, berperan sesuai yang tertuang pada tujuan di dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020, antara lain memfasilitasi penyelenggaraan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi. Namun, kurangnya informasi dan komunikasi menyebabkan peran tersebut belum dirasakan PKBM di Papua Barat dan Papua. Sementara peran pemerintah daerah adalah melakukan pendataan dan rekrutmen, penyiapan sumber daya berupa dana, pendidik dan sarana prasarana, koordinasi dan pembinaan pembelajaran, memfasilitasi kemitraan PKBM dengan pihak swasta, evaluasi, memberikan penghargaan, membantu pemasaran hasil kerja warga belajar, dan sosialisasi. Peran pemerintah daerah ini belum seluruhnya dilaksanakan karena masih terbatasnya pemahaman pemerintah daerah berkenaan dengan pembelajaran vokasi fungsional di PKBM. Peran masyarakat selain menyelenggarakan PKBM yang jumlahnya masih sangat sedikit, juga sebagai tutor, instruktur, tenaga ahli, motivator, dan donatur. Selain itu, kepala suku, tokoh masyarakat, alumni dan pihak yang berpengaruh di lingkungan juga berperan pada pembelajaran vokasi fungsional.

Selain itu, peran dunia usaha dan industri juga penting, yaitu menyediakan tutor saat warga belajar melakukan praktik kerja, memberikan bantuan sarana-prasarana yang dibutuhkan PKBM, menjadi mitra praktik kerja, dan menjadi tempat bekerja bagi lulusan PKBM. Pengelola PKBM harus lebih meningkatkan responsivitas untuk memanfaatkan peran-peran dari berbagai pemangku kepentingan tersebut.

Pembelajaran vokasi fungsional di PKBM di Papua Barat dan Papua juga dapat dioptimalkan, antara lain dengan memanfaatkan berbagai praktik baik dari PKBM lain untuk diadopsi atau diadaptasi. Sebagai contoh, PKBM di Kota Surakarta, Kabupaten Bintan, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Lombok Barat, melakukan beberapa langkah yang dapat diadaptasi. *Pertama*, penetapan tujuan penyelenggaraan PKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal tempat PKBM berada. *Kedua*, perekrutan warga belajar melalui proses sosialisasi dan seleksi dengan pendataan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Dalam konteks vokasi fungsional, PKBM Lutfillah (Palangkaraya) dan PKBM Putra Bangsa (Pamalang) misalnya, dapat menjadi contoh dengan melakukan: 1) pemilihan keterampilan yang ada pangsa pasarnya atau membaca peta peluang; 2) pemilihan bahan produksi yang tidak mahal; serta 3) penguasaan dan pemahaman keterampilan atau kegiatan wirausaha oleh pengelola.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembelajaran vokasi fungsional di PKBM di Papua Barat dan Papua disimpulkan bahwa pembelajaran vokasi fungsional masih belum optimal karena terdapat banyak kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pembelajaran vokasi fungsional untuk PKBM di Papua Barat dan Papua berupa model sebagai berikut.



Gambar 1 Model Pembelajaran Vokasi Fungsional bagi Warga Belajar PKBM di Papua Barat dan Papua

Model Pembelajaran vokasi fungsional (Gambar 1) sudah menyinergikan berbagai potensi Papua Barat dan Papua, di antaranya: budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, potensi wilayah serta potensi sumber daya alam tempat PKBM berada. Diperlukan pemenuhan aspek-aspek pendukung mencakup: pendekatan andragogi karena warga belajar umumnya berusia dewasa, daya juang bagi warga belajar, penetapan zona substansi vokasi fungsional sesuai dengan status wilayah (tertinggal dan non-tertinggal) dan zona ekologis alam wilayah, penyiapan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pemberian pembelajaran kewirausahaan sebagai bekal pendamping pembelajaran vokasi fungsional, sertifikasi vokasi fungsional, pembelajaran daring dan luring sesuai kesiapan warga belajar, dan keberdayaan pengelola PKBM untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Model pembelajaran vokasi fungsional ini berimplikasi dalam hal: nomenklatur pembelajaran vokasi fungsional, pengkajian kembali kurikulum Paket B dan Paket C agar memberi manfaat bagi lulusannya, pemenuhan aspek-aspek program pembelajaran vokasi fungsional, perlunya intervensi pemerintah tentang kebijakan dan implementasi pembelajaran vokasi fungsional, perlunya peran pemerintah daerah dalam hal berkolaborasi dengan berbagai pihak, perlunya dukungan masyarakat dan dunia usaha dan industri agar program vokasi fungsional dapat terlaksana, serta perlunya pengelola PKBM melakukan langkah-langkah strategis.

Secara singkat, rekomendasi yang diusulkan sebagai berikut.

1. Pemerintah

- Menetapkan vokasi fungsional sebagai mata pelajaran tersendiri di dalam struktur kurikulum.
- Mengkaji kembali berbagai kebijakan tentang PKBM dan struktur kurikulumnya.
- Menerjemahkan pemenuhan 8 aspek pembelajaran vokasi fungsional dalam bentuk pembinaan teknis, petunjuk teknis, pedoman, panduan dan sebagainya.
- Merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan pembelajaran vokasi fungsional yang terdiri atas: kurikulum, sarana prasarana, instruktur, dan modul ajar atau buku.

2. Pemda

- Mengkaji potensi wilayah yang dapat dijadikan modal pembelajaran vokasi fungsional.
- Melakukan pendataan PKBM secara lengkap termasuk warga belajar.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian yang dapat ditempuh melalui pembelajaran vokasi fungsional di PKBM.
- Menyediakan sumber informasi dari pemerintah terkait dengan pembelajaran vokasi fungsional.
- Mendorong munculnya mata anggaran pembelajaran vokasi fungsional pada rencana dan anggaran daerah.
- Mendorong PKBM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi fungsional.

3. Dinas Pendidikan

- Mengidentifikasi potensi wilayah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan PKBM.
- Memilih jenis kegiatan vokasi fungsional yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi warga sekitar atau memiliki nilai jual tinggi, mengingat Papua merupakan wilayah pariwisata.
- Membangun jejaring dengan lembaga/institusi/wirausahawan yang relevan.

4. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

- Mensyaratkan sertifikat vokasi fungsional kepada pelamar kerja.
- Menerima lulusan PKBM sebagai karyawan.
- Mempertimbangkan posisi karyawan yang telah mengikuti vokasi fungsional tertentu.
- Menjadi mitra untuk praktik kerja vokasi fungsional.
- Membantu pemasaran hasil karya warga belajar.

5. Masyarakat

- Berupaya menyelenggarakan PKBM yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- Anggota masyarakat yang sukses dapat menjadi motivator bagi warga belajar atau menjadi guru vokasi fungsional tertentu.
- Kepala Suku dan tokoh masyarakat mendukung dan membantu memberikan rasa aman bagi pembelajaran di PKBM.
- Alumni dapat ikut membantu dana untuk pelaksanaan pembelajaran vokasi fungsional.

6. Pengelola PKBM

- Melakukan berbagai upaya pendekatan ke warga agar mau mengikuti aktivitas pembelajaran vokasi fungsional di PKBM.
- Mencari berbagai informasi praktik baik pembelajaran vokasi fungsional untuk diadopsi atau diadaptasi.
- Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Listiawati, N (2016). Persepsi Siswa Terhadap Daya Juang Serta Pola Asuh Orang Tua dan Guru di SD Berkreditasi A dan C di Kabupaten Bantul dan Bone Bolangi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.1, Nomor 3, Desember 2016.
- Kemendikbud (2017a). *Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Paket B*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud (2017b). *Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Paket C*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015 - 2019*.
- ACCU (2020). Literacy Watch Committee of Nepal Bulletin No. 7. http://www.accu.or.jp/litdbase/literacy/nrc_nfe/eng_bul/BUL9.pdf
- BPS. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*. Biro Pusat Statistik No. 56/07/Th.XXII 15 Juli 2019.
- Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Per Provinsi Berdasarkan Seluruh Bentuk Satuan Pendidikan*. Diakses dari: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php>, tanggal 24 Februari 2020.



Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827

Tim Penyusun

**Etty Sisdiana
Nur Listiawati
Yendri Wirda
Fransisca Nur'aini**